

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah (Rahardjo, 2014). Otonomi daerah akan menciptakan pemerintahan yang baik dengan mengubah cara sumber daya digunakan dan mengoptimalkannya. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Aset Negara kedepannya yang tertib, akuntabel, dan transparan. Diharapkan bahwa pengelolaan aset tetap yang profesional dan kontemporer yang mengutamakan pemerintahan yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan stakeholder terhadap pengelolaan keuangan negara. Menurut PP No. 6 Tahun 2006, pengelolaan aset tetap tidak hanya administrasi, melainkan cara berpikir yang lebih maju dalam menangani hal tersebut dengan cara meningkatkan efektivitas dan nilai tambah. Karena itu, pengelolaan aset tetap mencakup perencanaan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan. dan

Proses ini merupakan siklus logistic yang lebih khusus yang didasarkan pada kebutuhan untuk menyesuaikan siklus perbendaharaan dalam konteks keuangan negara yang lebih luas. Penataan dan penertiban aset tetap mencakup situasi di mana aset tetap belum dicatat dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku pada lembaga negara atau kementerian. Langkah-langkah penertiban aset tetap (inventarisasi dan penilaian) adalah untuk membuat manajemen aset negara untuk setiap penggunaan barang menjadi lebih akuntabel dan transparan. Dengan demikian, aset tetap dapat dimaksimalkan penggunaannya untuk digunakan untuk membantu masyarakat dan stakeholder.

Aset tetap merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah dan merupakan komponen penting dalam operasi pemerintahan dan penyediaan layanan publik. Oleh karena itu, pengelolaan aset tetap yang baik akan mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang baik.

Salah satu hal yang krusial dalam mengelola dan melaporkan keuangan pemerintah atau daerah adalah permasalahan aset. Pengelolaan aset tetap sangat penting dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas administrasi suatu kantor. Suatu perkantoran mempunyai aset-aset tetap yang harus dikelola dengan baik yang akan berguna dan menguntungkan. Pada dasarnya aset tetap dicatat per satuan karena setiap satuan aset tetap mempunyai ciri khas dan kondisi yang berbeda satu sama lain, walaupun diperoleh dalam waktu yang bersamaan. Permasalahan yang terjadi pada aset tetap merupakan permasalahan yang sering terjadi hampir setiap instansi pemerintah yang mempunyai jumlah aset yang sangat besar.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas,serta dengan adanya permasalahan yang ditemukan di lapangan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Kelautan dan Perikanan"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat diambil yaitu :

1. Bagaimana pengelolaan aset tetap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatra Barat
2. Apa saja kendala yang terjadi dalam pengelolaan aset tetap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatra Barat

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dan pelaksanaan magang sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan aset tetap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatra Barat
3. Untuk mengetahui kendala yang terjadi dalam pengelolaan aset tetap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatra Barat

1.4 Manfaat Penulisan

Hasil dari penulisan ini dapat memberikan manfaat dari berbagai pihak, yaitu :

1. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan penulis mengenai analisis pengelolaan aset tetap dengan masalah-masalah yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pengelolaan aset tetap.

2. Bagi Instansi

sebagai bahan masukan atau pertimbangan bagi dinas kelautan dan perikanan provinsi Sumatra barat untuk melihat sejauh mana penerapan yang telah dilakukan dalam memaksimalkan pengelolaan aset tetap, sehingga pada waktu kedepan dinas kelautan dan perikanan provinsi Sumatra barat dapat berkembang sesuai dengan yang diharapkan.

1.5 Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian penulis mendapatkan data melalui metode sebagai berikut :

1.5.1 Study Keperpustakaan

Dilakukan dengan mencatat data yang relevan dengan objek penelitian. Data dan informasi tersebut bisa didapatkan dari buku-buku, karya ilmiah, dan sumber lainnya

1.5.2 Study Lapangan

1. Data Primer

Data yang diperoleh hasil diskusi Bersama pegawai dan pejabat yang ada pada Dnas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dengan cara pengambilan dokumen tertulis maupun elektronik di instansi terkait untuk kelengkapan data.

1.6 Tempat dan waktu pelaksanaan magang

Kegiatan magang ini dilakukan selama 40 hari kerja yang bertempat di dinas kelautan dan perikanan provinsi Sumatra barat

1.7 Sistematika Penulisan

Adapun untuk sistematika penulisa laporan magang ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan peneltian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisikan landasan teori yang menjelaskan teori-teori pendukung yang digunakan dalam pelandasan pembahasan tugas akhir

BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bab ini berisikan gambaran umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat meliputi Sejarah berdirinya, visi dan misi, tujuan, sasaran serta arah kebijakan instansi, dan struktur.

BAB IV : PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan tentang “*Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat*”.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat

